UNIVERSITAS GADJAH MADA
Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Korupsi: Studi Perbandingan Negara Amerika Serikat, Australia dan Irlandia
Martinus Restia Reswara, Dr. Sigid Riyanto, S.H., M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2025 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Greenberg, et al., 2009, *Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture*, The World Bank, Washington DC.

Hamzah, Andi, 1991, *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama.

Husein, Yunus, 2019, *Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam perkara Tindak Pidana* Korupsi, PSHK, Jakarta.

Istanto, F. Sugeng, 2007, *Penelitian Hukum*, CV Ganda, Yogyakarta.

Liley, Peter, 2006, *Dirty Dealing: The Untold Truth about Global Money Laundering, International Crime and Terrorism (Fully Revised and Updated Third Edition)*, Kogan Page, London-Philadelphia.

Marzuki, Peter Mahmud, 2019, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, PRENADAMEDIA GROUP Divisi Kencana, Jakarta.

Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sjahdeni, Sutan Remy, 2004, *Seluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, PT Pustaka Utama Grafitri, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.

Wiyono, R., 2014, *Pembahasan Undang-Undang Penegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta.

Yanuar, Purwaning M., 2007, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Alumni, Jakarta.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 1660).

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Korupsi: Studi
Perbandingan Negara Amerika Serikat, Australia dan Irlandia**
Martinus Restia Reswara, Dr. Sigid Riyanto, S.H., M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2025 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indnesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara 5164)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016

Anti-Money Laundering and Counter Terrorism Financing Act 2006 No. 169, 2006
Title 5 United States Code

Title 6 United States Code

Title 18 United States Code

Title 21 united States Code

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Korupsi: Studi Perbandingan Negara Amerika Serikat, Australia dan Irlandia
Martinus Restia Reswara, Dr. Sigid Riyanto, S.H., M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2025 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Title 26 Code of Federal Regulations

Title 28 Code of Federal Regulations

Criminal Asset Bureau Act 1996

Civil Asset Forfeiture Reform 2000

Proceeds of Crime Acts 2022 (Cth)

Prosecution Policy of The Commonwealth: Guidelines for The Making of Decisions in the Prosecution Process

3. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016

Gilligan v. Criminal Assets Bureau (1998 3 IR 185)

Criminal Assets Bureau v. Murphy (2018 IESC 12)

4. Jurnal

Budi Bahreisy, "Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Kerugian Negara dari Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, Vol. 15, No. 2, Juli 2018.

Campbell, Liz dan Aine Clancy, "The Principled and Practical Limits to Unexplained Wealth Orders", *University of Western Australia Law Review*, Vol 52 (I):1, 2024.

Hakim, Lukmanul dan Abraham Yazdi Martin, " Tindak Pidana Pencucian Uang dan Modusnya dalam Perspektif Hukum Bisnis", *Jurnal De'Rechstaat*, Vol. I/1, 2015.

Nandang Sambas dan Ade Mahmud, "Model Penegakan Hukum Progresif dalam Pengembalian Kerugian Negara melalui Pidana Uang Pengganti", Lex Lata Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 2, 2019.

Refki Saputra, "Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia", Integritas: Jurnal Antikorpsi, Vol. 3, No. 1, Maret 2017.

Sammer Ahmad, "Corruption and Money Laundering: The Nexus and The Way Forward", International Journal of Government Auditing,_,_,

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Korupsi: Studi
Perbandingan Negara Amerika Serikat, Australia dan Irlandia**
Martinus Restia Reswara, Dr. Sigid Riyanto, S.H., M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2025 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Tromme, Matt, "Waging War against Corruption in Developing Countries: How Asset Revocery can be Compliant with the Rule of Law", *Duke Journal of Comparative and International Law,* Vol. 29:140.

5. Hasil Penelitian/Skripsi/Tesis/Disertasi

Hotma PD. Sitompoel, 2016, *Pelaksanaan Asset Recovery dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana dan Hukum Perdata Indonesia*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Asnawi, 2016, *Penerapan Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture Terhadap Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Perampasan di Indonesia*, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Kampus Jakarta.

Diego Febryano Sanrose, 2021, *Pengaturan dan Implementasi Perampasan Aset di Pasar Modal dalam Perkara Tndak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Korupsi*, Skripsi, Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Wahyudi Hafiludin Sadeli, 2010, *Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga yang Terkait dengan Tindak Pidana Korupsi*, Tesis, Program Pascasarjana Hukum Kekhususan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

6. Makalah/Pidato

Tim Penyusun, 2018, *Pedoman Memahami Tipologi Pencucian Uang dari Korupsi dan Strategi Penanganannya*, Komisi Pemberantasan Korupsi-*Departmen of Home Affairs Australia* dan SustaIN, Jakarta.

Smith, Marcus dan Russel G. Smith, "Exploring the Procedural Barriers to Securing Unexplained Wealth Orders in Australia", Report to The Criminology Research Advisory Council-Criminology Research Grant, *CRG Report Number:* 1220-16, 2016.

7. Website

Darpana Sheth, "Incentives Matter: The Not-So-Civil Side of Civil Forfeiture", *https://www.fedbar.org/wp-content/uploads/2016/07/Civil-Forfeiture-pdf-1.pdf*, (diakses tanggal 23 Juli 2025)

John Malcolm, "Civil Asset Forfeiture: Good Intentions Gone Awry and the Need Reform ", *https://www.heritage.org/crime-and-justice/report/civil-asset-*

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Korupsi: Studi
Perbandingan Negara Amerika Serikat, Australia dan Irlandia**
Martinus Restia Reswara, Dr. Sigid Riyanto, S.H., M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2025 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

forfeiture-good-intentions-gone-awry-and-the-need-reform#_ftn38. (25 Juli 2025)

Kemendikbud, 2016, "Aset dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring", *https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/aset*. (diakses tanggal 1 Agustus 2022)

Kemendikbud, 2016, "Perampasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring", *https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perampasan.* (diakses tanggal 1 Agustus 2022)

Kemendikbud, 2016, "Rampas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring", https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rampas, diakses 1 Agustus 2022.

Mirriam-Webster, 2022, "Asset", *https://www.merriam-webster.com/dictionary/asset.* (diakses tanggal 1 Agustus 2022)

Tri Jata Ayu Pramesti, 2015, "Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Hukum Indonesia", *https://www.hukumonline.com/klinik/a/perampasan-aset-tanpa-pemidanaan-dalam-hukum-indonesia-lt550190f5671f1*.(diakses tanggal 15 September 2022)